

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN**

#### **A. Paparan Data Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas pada Pilkada Serentak tahun 2018 di Kabupaten Tulungagung**

Partisipasi politik masyarakat untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik suatu negara demokrasi dapat dilihat sebagai wujud kedaulatan negara dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat dengan jalan memilih pemimpin negara dan, baik secara langsung atau tidak langsung guna mempengaruhi proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan umum.

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan yakni dari Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung yang terletak di jalan KH. R. Abdul Fattah desa Botoran Kecamatan Tulungagung. Pemilih penyandang disabilitas juga terlibat kegiatan dalam tahapan pilkada serentak kemarin. Hal ini diungkapkan oleh narasumber yang penulis wawancarai bernama Bapak David Hartanto selaku Kasubag Teknis dan Hupmas yang menyatakan bahwa:

KPU bekerjasama dengan komunitas disabilitas yang ada di Kabupaten Tulungagung. Ada Percatu (persatuan cacat tubuh), ada Pertuni (tunanetra), dan komunitas disabilitas lainnya. Namun, untuk komunitas tunarungu ini tidak dapat terjangkau oleh KPU karena dari pihak komunitas sendiri masih belum mau untuk diajak bergabung.<sup>1</sup>

Keterlibatan pemilih penyandang disabilitas memang sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan sudah menjadi hak para

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan bapak David selaku Kasubag Teknis dan Hupmas KPU Tulungagung , pada tanggal 8 Januari 2019

penyandang disabilitas untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan politik salah satunya dengan datang ke TPS (tempat pemungutan suara). Hal ini ditegaskan oleh bapak Mustofa selaku anggota komisioner KPU Tulungagung devisi Partisipasi Masyarakat yang mengungkapkan:

Kita berharap atau KPU berharap partisipasi mereka atau teman-teman penyandang disabilitas untuk dapat mensukseskan pilkada dengan cara datang ke TPS (tempat pemungutan suara) dengan menggunakan hak pilihnya.<sup>2</sup>

Partisipasi masyarakat berkebutuhan khusus yang ada di Kabupaten Tulungagung ini dapat di lihat pada keterlibatannya dalam tahapan-tahapan pilkada serentak kemarin. Hal ini dijelaskan juga oleh Pak Didik:

Untuk keterlibatannya, ya mulai dari tahapan sosialisasi, juga dilibatkan dalam pembuatan film dokumentasi reka adegan ketika di Tempat Pemungutan Suara (TPS).<sup>3</sup>

Selain itu, tercatatnya para pemilih penyandang disabilitas dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pilkada juga merupakan wujud perhatian pemerintah dalam memperoleh hak politik, berikut keterlibatan pemilih penyandang disabilitas dalam tahapan pilkada serentak 2018:

### **1. Proses Pemutakhiran Data Pemilih Penyandang Disabilitas**

Pelaksanaan proses pemutakhiran data pemilih pada pilkada serentak tahun 2018 kemarin dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang bertugas melakukan pendataan dengan mencocokkan dan meneliti Daftar Pemilih Potensial Pemilu (DP4) yang di dapat dari Komisi Pemilihan Umum (KPU)

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Mustofa selaku anggota komisioner KPU Tulungagung, pada tanggal 8 Januari 2019

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Didik selaku Ketua Komunitas Percatu Tulungagung, pada tanggal 26 Januari 2019.

Tulungagung dengan yang ada di masyarakat sekitar wilayah pendataannya. Elemen pendataan yang dilakukan oleh PPDP dalam mencocokkan data, salah satunya yakni mencantumkan keterangan disabilitas pada Daftar Pemilih Potensial Pemilu (DP4). Hal ini dijelaskan oleh pak Mustofa dalam wawancara, sebagai berikut:

Ketika bimbingan teknis terhadap penyelenggara baik kepada Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), serta kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di mana merekalah yang berhadapan langsung dengan masyarakat, kami (KPU) menekankan untuk lebih meneliti masyarakat yang memang tergolong pemilih disabilitas. Agar kita tahu dengan pasti berapa jumlah pemilih disabilitas yang ada di Kabupaten Tulungagung.<sup>4</sup>

Dilaksanakannya pemutakhiran data pemilih oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) agar dapat mengetahui jumlah secara pasti Daftar pemilih Tetap (DPT) yang ada di Kabupaten Tulungagung. Begitu pula dengan dapat diketahuinya berapa jumlah pemilih penyandang disabilitas. Ungkap pak David:

Saya rasa semua penyandang disabilitas untuk Kabupaten Tulungagung yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih. Malah data kita lebih valid ketimbang milik Dinas Sosial. Selain itu, ketika kita (KPU) minta data ke Dinas Sosial juga susah, tetap tidak ada jawaban pasti. Sehingga kita (KPU) memilih mengacu pada hasil pemutakhiran data yang dilakukan oleh rekan-rekan di tingkat kecamatan maupun desa. Tapi data jumlah pemilih masih dibagian program nanti minta saja langsung kesana ya.<sup>5</sup>

Hal ini juga dipertegas oleh pak Mustofa, yang menyatakan bahwa:

Dengan dilakukannya pemutakhiran data oleh PPDP semua pemilih penyandang disabilitas dapat tercatat dalam Daftar pemilih. Namun untuk jumlah pastinya nanti, mbak tanyakan ke pak David saja. Beliau kan sebagai

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Mustofa selaku anggota komisioner KPU Tulungagung, pada tanggal 8 Januari 2019.

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan bapak David selaku Kasubbag Teknis dan Hupmas KPU Tulungagung, pada tanggal 8 Januari 2019

pelaksana. Data-datanya semua ada di pak David atau malah masih di bagian program di ruangnya pak Anam.<sup>6</sup>

Dengan diarahkannya menuju sub-bagian program dan data untuk mengetahui jumlah daftar pemilih penyandang disabilitas. Akhirnya diketahui secara pasti jumlah pemilih penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Tulungagung. Pada bagian program penulis juga melakukan wawancara terkait proses pemutakhiran data pada pemilih penyandang disabilitas. Berikut paparan dari Pak Anam:

Kalau untuk jumlah pemilih disabilitas yang ada di Tulungagung sekitar 1235 orang. Dan itu semua hasil dari proses pencoklitan PPDP, jadi semua bisa terdata dengan baik. Kalau butuh data secara keseluruhan minta ke mas Bagus saja.<sup>7</sup>

Proses pemutakhiran data yang dilaksanakan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) menghasilkan jumlah pemilih penyandang disabilitas yang tersebar pada seluruh kecamatan di Kabupaten Tulungagung, yakni sebagai berikut.

Tabel 4.1. Jumlah Pemilih Penyandang Disabilitas Kabupaten Tulungagung

Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Tulungagung	Jumlah sebaran pemilih disabilitas		Jumlah total
	Jumlah pemilih laki-laki	Jumlah pemilih perempuan	
1. Bandung	56	71	127
2. Besuki	5	9	14
3. Boyolangu	14	12	26
4. Campurdarat	3	4	7
5. Gondang	50	59	109
6. Kalidawir	7	4	11
7. Karangrejo	11	6	17
8. Kauman	63	77	140
9. Kedungwaru	12	7	19
10. Ngantru	34	27	61

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Mustofa selaku anggota komisioner KPU Tulungagung, pada tanggal 8 Januari 2019.

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Anam selaku Kasubbag Perencanaan, Program dan Data KPU Tulungagung, pada tanggal 8 Januari 2019.

11. Ngunut	45	54	99
12. Pagerwojo	9	10	19
13. Pakel	40	39	79
14. Pucanglaban	58	99	157
15. Rejotangan	27	31	58
16. Sendang	10	10	20
17. Sumbergempol	67	85	152
18. Tanggunggunung	21	35	56
19. Tulungagung	26	38	64
Jumlah keseluruhan	558	677	1.235

Sumber: KPU Tulungagung model DB1-KWK Sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

Apabila dipresentasikan jumlah pemilih disabilitas yang ada di Kabupaten Tulungagung sebesar 0,15% dari 848.818 jumlah keseluruhan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pilkada tahun 2018.

Terdapat pula penjelasan dari ketua komunitas Percatu yakni pak Didik.

Yang menekankan untuk lebih memperhatikan penyandang disabilitas:

Jadi dalam pendataan disabilitas memang kami mengharapkan pada KPU untuk semua penyandang disabilitas itu untuk diberi keterangan, untuk wilayah ini penyandang disabilitasnya apa. Sehingga kalau seperti itu kan nanti petugas TPS, atau petugas PPK itu bisa membuat dalam menentukan TPSnya itu bisa menyesuaikan.<sup>8</sup>

Pada Kabupaten Tulungagung sendiri persebaran masyarakat penyandang disabilitas dapat dibilang cukup banyak. Hal ini dapat diketahui berdasarkan data penduduk Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung yang diperbarui per 4 April 2018 terdapat penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2017 sejumlah 3.727 jiwa.<sup>9</sup> Tercatat sejumlah 472 jiwa paca netra, 1047 jiwa paca tubuh, 1627 jiwa paca mental, 409 jiwa paca rungu wicara, dan

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Didik selaku Ketua Komunitas Percatu Tulungagung, pada tanggal 26 Januari 2019.

<sup>9</sup> Lihat <https://tulungagungkab.bps.go.id/statictable/2018/03/20/1552/penderita-cacat-dan-eks-kusta-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-di-kabupaten-tulungagung-2017> diakses pada 28 februari 2019 pukul 11.34 WIB.

172 jiwa eks kusta. Semua data tersebut menurut kecamatan dan diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin.

Masyarakat penyandang disabilitas yang penulis wawancara juga memaparkan bahwa mereka juga dilakukan pendataan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Berikut penjelasannya:

Sutri Astutik warga desa Sumberbendo kecamatan Pucanglaban.

Penyandang disabilitas Tunadaksa.

*“lekne kulo nggeh didata kaleh petugas mba, mboten dadak lapor RT, dados kulo saget tindak ten TPS mba”*.<sup>1</sup> 0

Djirin Mudjiono warga desa Demuk kecamatan Pucanglaban. Penyandang

disabilitas Tunanetra.

*“wingi pas pilihan bupati kulo nggeh angsal undangan mba, tapi keluarga mboten enten seng ndugekne ten TPS, dados mboten milih kulo. Sakjane menawi petugase purun mriki ngoten kulo nggeh pengen milih mba, tapi bene wong ya gak disangoni. hahaha”*.<sup>1</sup> 1

Ribut Purniawan warga desa Kalidawe kecamatan Pucanglaban.

Penyandang disabilitas Tunarungu/wicara dengan bantuan adiknya yakni Deni

Firmansah

*“waktu petugas datang kemari (ke rumah) saya tidak tahu, tapi saya diberitahu adik saya ini bahwa telah mendapat undangan untuk pilkada kemarin”*.<sup>1</sup> 2

Katemi warga Kaligentong kecamatan Pucanglaban. Penyandang disabilitas

tunadaksa.

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Sutri Astutik penyandang<sup>0</sup> disabilitas tunadaksa, tanggal 14 Januari 2019

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Djirin Mudjiono penyandang disabilitas tunanetra, tanggal 14 Januari 2019

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ribut penyandang disabilitas tunarungu/wicara, tanggal 14 Januari 2019 dengan bantuan dari adik bungsunya yang bernama Deni menjelaskan bahwa telah didata oleh petugas PPDP desa setempat guna mendapatkan hak pilihnya.

*“nggeh lek didata mestine di data mba, wong kulo mboten semerap, tapi kulo mboten tindak ten TPS, kan mboten saget mlampah mba”*.<sup>1</sup>

Aminah warga desa Waung, kecamatan Boyolangu. Penyandang disabilitas tunadaksa.

*“lekne kulo di data mba, terus nggeh angsal undangan. Alhamdulillah ew nggeh saget tindak ten TPS”*.<sup>1</sup>

Sadjuri warga desa Ngranti, kecamatan Boyolangu. Penyandang disabilitas tunanetra.

*“jane kulo nggeh di data mba, nggeh angsal undangan. Tapi mboten tindak ten TPS mba, timbang mengke ngrepoti. Lha jarene anakku TPSe duwur, dadi ya pilih enggak mba”*.<sup>1</sup>

Wahyu Setiawan desa Ngranti kecamatan Boyolangu. Penyandang disabilitas tunagrahita.

*“hemmm didata mba aku, tapi enggak ndek TPS mba. Enggak eroh carane piye sanu gak oleh di baturi”*.<sup>1</sup>

Rumit warga desa Balerejo kecamatan Kauman. Penyandang disabilitas tunadaksa.

Petugas ya datang sendiri ke rumah saya, jadi gak harus lapor ke RT. Kalo saya masih bisa ya mba datang ke TPS, gak tahu kalo yang lain.<sup>1</sup>

Yatno warga desa Gebang kecamatan Pakel. Penyandang disabilitas tunadaksa.

Kamarin itu saya di data mba sama petugas, saya juga bisa datang ke TPS cuma saya nyoblosnya di atas motor. Ya saya tanya sama petugas maupun pengawas yang ada boleh apa enggak, terus katanya boleh.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Katemi penyandang disabilitas tunadaksa, tanggal 14 Januari 2019

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Aminah penyandang disabilitas tunadaksa, tanggal 17 Januari 2019

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sadjuri penyandang disabilitas tunanetra, tanggal 17 Januari 2019

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Wahyu Setiawan penyandang disabilitas tunagrahita, tanggal 17 Januari 2019

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Rumit penyandang disabilitas tunadaksa, tanggal 20 Januari 2019

Agus warga desa Sukowiyono kecamatan Karangrejo. Penyandang disabilitas tunadaksa.

Saya di data mba sama petugas, yang datang ke rumah. Terus sebelum pencoblosan saya juga dapat undangan buat bisa milih.<sup>1</sup>

Binti Lestari warga desa Pandansari kecamatan Ngunut. Penyandang disabilitas tuna daksa.

Kalo saya kemarin ya di data mbak, cuma waktu pelaksanaan pemungutan suara saya tetep antri kayak masyarakat pada umumnya. Soalnya kalo dilihat saya kan gak seperti orang berkebutuhan khusus. Jadi petugaspun juga menyuruh saya antri.<sup>2</sup>

## 2. Tahapan Sosialisasi Pilkada Ramah Disabilitas

Tercatatnya secara keseluruhan pemilih penyandang disabilitas pada pilkada di Kabupaten Tulungagung tersebut tidak terlepas dari diadakannya sosialisasi baik di tingkat penyelenggara sendiri maupun di kalangan masyarakat. Terutama dikalangan masyarat penyandang disabilitas. Pada tahapan pilkada serentak tahun 2018, sosialisasi yang di laksanakan oleh KPU dilakukan beberapa kali agar dapat mewujudkan pilkada yang ramah disabilitas seperti yang diinginkan KPU pada pilkada tahun 2018. Hal ini dijelaskan oleh pak David, yakni:

Dalam melaksanakan sosialisasi terhadap para penyandang disabilitas kami (KPU) bekerjasama dengan komunitas disabilitas yang ada di Kabupaten Tulungagung. Ada Percatu, ada Pertuni, dan komunitas disabilitas lain. Sebenarnya ada juga komunitas penyandang tunarungu. Namun, komunitas tunarungu masih belum dapat terjangkau oleh KPU selain tidak adanya

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Yatno penyandang disabilitas tunadaksa, tanggal 21 Januari 2019

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Agus penyandang disabilitas tunadaksa, tanggal 22 Januari 2019.

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Binti Lestari penyandang<sup>0</sup>disabilitas tunadaksa, tanggal 23 Januari 2019.



penyedia penerjemah dari Dinas Sosial, pihak komunitas sendiri yakni ketuanya juga masih belum mau bergabung.<sup>2</sup>

Sosialisasi yang dilakukan demi terwujudnya pilkada yang ramah disabilitas pada pilkada 2018 kemarin juga dilakukan di beberapa titik sosialisasi. Ditegaskan oleh Pak Mustofa:

Ada beberapa titik yang menjadi objek sosialisasi KPU pada saat itu. Ada dari komunitas seperti percatu dimana dalam pelaksanaannya adakalanya mereka kita undang di media center yang ada di KPU, ada pula kita (KPU) mendatangi kesana. Setelah itu kita juga melakukan sosialisasi di masyarakat, salah satunya kemarin dilaksanakan di radio Liur FM yang dekat dengan pasar Ngemplak itu. Saat itu diikuti banyak elemen masyarakat. Kemudian para penyelenggara seperti PPK, PPS juga kita tekankan lagi selain melakukan pendataan mereka juga harus ikut melakukan sosialisasi baik di tingkat kecamatan maupun desa.<sup>2</sup>

Dalam tahapan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU terdapat beberapa materi yang dijelaskan didalamnya. Diungkapkan oleh pak Mustofa:

Materi yang disampaikan pada saat sosialisasi tentunya ajakan kepada mereka bahwa dengan apa ya.. keterbatasan yang dimiliki mereka, mereka tetap memiliki hak yang sama dalam hal partisipasi mensukseskan pilkada. Oleh karena itu, kita (KPU) berharap partisipasi mereka itu untuk mensukseskannya. Nah dengan cara apa? Ya.. datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan menggunakan hak pilihnya itu himbauannya. Kemudian selain dari itu, kita (KPU) juga memberikan sosialisasi kepada mereka bagaimana cara mencoblos, tanggal berapa pelaksanaan pilkada, cara mengenali calon mulai dari mengetahui visi misinya, kemudian memberitahu dan meminta kepada mereka untuk menjadi pemilih yang cerdas. Yakni pemilih yang menggunakan hati nurani atas dasar mengetahui program kerjanya, *track record* calonnya, tidak berdasarkan atas “janji/pemberian” yang sifatnya pragmatis seperti *money politic*.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan bapak David selaku Kasubbag<sup>1</sup> Teknis dan Hupmas KPU Tulungagung, pada tanggal 8 Januari 2019

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Mustofa selaku anggota komisioner KPU Tulungagung, pada tanggal 8 Januari 2019.

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Mustofa selaku anggota komisioner KPU Tulungagung, pada tanggal 8 Januari 2019.

Dengan begitu dapat diketahui bahwa dalam pengenalan calon pada saat sosialisasi yang dilakukan oleh KPU kepada para pemilih penyandang disabilitas tidak secara subjektif. Ulas pak Mustofa:

Tentu dalam melakukan pengenalan calon terhadap para penyandang disabilitas ini kita lakukan secara objektif tidak subjektif. Dan yang diperkenalkan tidak hanya satu calon saja tapi secara keseluruhan. Pada pilkada kemarin kan ada dua pemilihan dan pas juga masing-masing dua. Pemilihan bupati dan wakil bupati ada nomer urut satu pasangan Margiono dengan Eko dan nomer urut dua ada pasangan Syahri Mulyo dengan Maryoto Birowo. Kemudian di pemilihan gubernur dan wakil gubernur nomer urut satu ada pasangan Khofifah dengan Emil Dardak dan nomer urut dua ada pasangan Gus Ipul dengan Mbak Puti.<sup>2</sup>

Melihat dilakukannya sosialisasi dengan para pemilih penyandang disabilitas dimana, mereka memiliki keterbatasan dalam menangkap dan memahami pelajaran yang diberikan. Menjadi tantangan tersendiri oleh KPU dalam melakukan sosialisasi. Terlebih bisa dapat melakukan sosialisasi yang tepat sasaran dan dapat mencapai target yang diinginkan. Dijelaskan oleh pak Mustofa:

Setelah apa yang kita (KPU) sampaikan tentu orang yang apa lagi dengan keterbatasan yang dimiliki, daya terimanya pun juga berbeda beda. Ada yang bisa langsung paham, ada yang masih sedikit-sedikit paham. Sehingga perlu kita maklumi, bahwa kita harus mengulang-ulang kembali apa yang disampaikan. Dan jika dilihat dari respon mereka dengan diadakannya ini, mereka sangat menerima sekali. Dengan adanya sosialisasi kan mereka juga merasa diorangkan.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Mustofa selaku anggota komisioner KPU Tulungagung, pada tanggal 8 Januari 2019.

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Mustofa selaku anggota komisioner KPU Tulungagung, pada tanggal 8 Januari 2019.

Pada pelaksanaan sosialisasi banyaknya peserta yang mengikuti juga menjadi tolak ukur seberapa pedulikan masyarakat dan seberapa besar tingkat partisipasi mereka dalam pelaksanaan pilkada. Dipaparkan oleh pak Mustofa:

Untuk jumlah yang ikut dalam sosialisasi kemarin ya. Sekitar 50-75an kayaknya, itu dari komunitas dan beberapa masyarakat. Selain itu kan, pempdamping yang disabilitas kan juga ikut masuk jadi ya banyak.<sup>2</sup>

Sedangkan menurut pak David:

Target dalam pelaksanaan sosialisasi ya tercapai 100%, dengan sosialisasi kan itu jumlah pemilih jadi ikut masuk semua ke DPT. Namun kalau untuk keikutsertaannya dalam kegiatan sosialisasi hanya beberapa orang ya sekitar 50-100 orang lah. Sebab kan ada orang yang aktif dalam organisasi, ada juga yang tidak. Jadi yang gak aktif organisasi itu yang gak ikut. Tetapi mereka tetap dapat masuk dalam Daftar Pemilih.<sup>2</sup>

Hal ini juga ditambahkan oleh pak Didik selaku Ketua komunitas Percatu yang mengikuti kegiatan sosialisasi.

Kalau kemarin dari komunitas kami itu, dalam sosialisasi tidak hanya mewakili komunitas saja, tetapi juga mewakili seluruh penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Tulungagung.<sup>2</sup>

Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat penyandang disabilitas yang tidak tahu apabila terdapat sosialisasi untuk pemilih penyandang disabilitas. Seperti Bapak Dijrin Mujiono, Bapak Ribut Puriawan, Ibu Katemi, Bapak Sadjuri, Wahyu Setiawan, dan masyarakat penyandang disabilitas lainnya yang ada di beberapa kecamatan yang terbilang jauh dari pusat kota.

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Mustofa selaku anggota komisioner KPU Tulungagung, pada tanggal 8 Januari 2019.

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan bapak David selaku Kasubbag Teknis dan Hupmas KPU Tulungagung, pada tanggal 8 Januari 2019

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Didik selaku Ketua Komunitas Percatu Tulungagung, pada tanggal 26 Januari 2019.

Di sisi lain terdapat beberapa warga disabilitas yang di wawancara oleh penulis telah tergabung dalam komunitas yang juga dilakukan sosialisasi oleh KPU. Seperti Ibu Sutri Astutik, Ibu Aminah, Bapak Rumit, Bapak Yatno, dan dan Bapak Agus.

Dengan diadakannya sosialisasi dapat di ketahui jenis-jenis penyandang disabilitas yang tersebar di Kabupaten Tulungagung. Sehingga memudahkan KPU dalam menindak lanjuti penyediaan sarana prasarana yang nantinya digunakan dalam pelaksanaan pemungutan suara.

### **3. Sarana Prasarana Pemilih Penyandang Disabilitas**

Partisipasi pemilih penyandang disabilitas dalam pilkada serentak tahun 2018 tidak terlepas dari adanya sarana prasarana yang digunakan untuk menunjang mereka. Terdapat beberapa sarana prasarana yang disediakan oleh KPU untuk dapat membantu partisipasi para pemilih penyandang disabilitas baik dalam kegiatan sosialisasi maupun pada saat dilakukannya pemungutan suara. Bapak David menjelaskan:

Sarana prasarana yang disediakan oleh KPU kemarin kalau waktu sosialisasi ya mereka diperkenankan membawa pendamping sendiri itu saja. Kemudian pada saat pemilihan sarana yang disediakan ada template atau alat bantu coblos, lalu fasilitas TPS yang ramah disabilitas. Nah itu seperti tidak berundak, atau bila di tempat yang tinggi harus ada bidang miring untuk pengguna kursi roda. Dan untuk pendamping kita gunakan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang ada di TPS atau saudara dari pemilih disabilitas yang telah mengisi form untuk pendamping.<sup>2</sup>

Penyediaan sarana dan prasaran juga dipaparkan oleh pak Mustofa:

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan bapak David selaku Kasubbag<sup>g</sup> Teknis dan Hupmas KPU Tulungagung , pada tanggal 8 Januari 2019

Saat sosialisasi kebanyakan hanya diantar sama keluarganya saja, adapun pendamping hanya beberapa dan kita juga ajak masuk ikut sosialisasi. Kalau di TPS kan ketentuannya juga seperti itu, ada orang yang ditunjuk oleh si penyandang disabilitas untuk membantu itu apabila ingin di dampingi. Namun rata-rata bisa, karena ada alat bantu. Jadi yang menjadi ketentuan di dalam PKPU itu dan juga di dalam Undang-Undang no. 10 Tahun 2016. Bahwa dalam penyelenggaraan pilkada TPS itu dalam rangka memberikan fasilitas yang sama kepada kelompok disabilitas maka ketentuan-ketentuan itu juga harus dipenuhi. Misalnya akses masuk ke TPS tidak boleh kurang dari 60cm, dalam rangka agar yang membawa kursi roda itu bisa masuk, minimal itu. Kemudian untuk menuju ke situ diupayakan tidak ada tanjakan yang dapat mempersulit akses masuk. lalu kalau yang terkait dengan alat bantu seperti yang saya sampaikan yakni disediakan template. Rata-rata template ya untuk yang tunanetra.<sup>3</sup>

Masyarakat sendiri juga mengharapkan adanya kemudahan dalam akses ke TPS, juga disediakan alat-alat yang dapat mempermudah masyarakat yang memiliki keterbatasan, di tambah lagi dengan di dukung dengan petugas TPS yang mau dan peduli dengan penyandang diabilitas.

Saya berharap mulai dari pelayanan, alat peraga atau alat bantu, juga masalah penataan TPS untuk disesuaikan. Jadi dalam pendataan disabilitas, kami mengharapkan pendataan itu untuk semua penyandang disabilitas diberi keterangan. Jadi dia tahu wilayah ini terdapat penyandang disabilitas apa. Jadi mungkin disini ada umpama penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda itu bisa dan tidak kesulitan, Dan untuk tunanetra itu kan juga perlu adanya alat bantu yang namanya tamplate. Itu sangat membantu sekali. Dan atau tidak untuk tuna daksa, apabila dia kesulitan datang ke tps kami memang mengharapkan untuk mensosialisasi keluarga. Agar keluarga nanti tidak takut menyampaikan kepada petugas.<sup>3</sup>

Namun terdapat beberapa pendapat masyarakat yang merasa masih kurangnya sarana prasarana yang disediakan. Seperti akses masuk ke lokasi TPS

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Mustofa selaku anggota komisioner KPU Tulungagung, pada tanggal 8 Januari 2019.

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Didik selaku Ketua Komunitas Percatu Tulungagung, pada tanggal 26 Januari 2019.

yang tidak dapat dijangkau oleh pemilih penyandang disabilitas, hingga kurang perhatiannya petugas terhadap keberadaan pemilih penyandang disabilitas.

Ribut Purniawan warga desa Kalidawe kecamatan Pucanglaban.

Penyandang disabilitas Tunarungu/wicara.

*“petugase gak ngerti mba lek aku iku tunarungu, padahal ya wes enek keterangane. Tapi aku panggah nunggu sampek meh bar arep penghitungan suara ”.*<sup>3</sup> 2

Yatno warga desa Gebang kecamatan Pakel. Penyandang disabilitas tunadaksa.

Saya rasa mungkin kurang tepatnya pemilihan TPS mba, harusnya kan disesuaikan dengan standar yang ada. Ya kayak saya ini kalo suruh jalan ya gak bisa, bisanya *ngesot*. Ya minim ada jalan lah buat kursi roda bisa masuk, soalnya kalau saya mau masuk, saya ya gak bisa jangkau kotak maupun bilik, tetep butuh kursi.<sup>3</sup> 3

Kurangnya sarana prasarana, dan tidak sepenuhnya kepedulian petugas terhadap pemilih penyandang disabilitas memunculkan rasa ketidakberanian masyarakat untuk meminta kemudahan. Hal ini menimbulkan rendahnya partisipasi pemilih penyandang disabilitas di Kabupaten Tulungagung.

#### **4. Tingkat partisipasi pemilih penyandang disabilitas**

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu maupun pilkada sering kali dipandang sebagai kualitas sistem dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi. Sehingga apabila tingkat partisipasi masyarakat dalam negara tersebut rendah, menunjukkan legitimasi yang rendah pula. Lantas partisipasi

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ribut penyandang disabilitas tunarungu/wicara, tanggal 14 Januari 2019 dengan bantuan adik bungsunya Deni yang menjelaskan bahwa Pak Ribut mengalami pengabaian oleh petugas TPS pada saat pemungutan suara.

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Yatno penyandang disabilitas tunagrahita, tanggal 21 Januari 2019

pemilih penyandang disabilitas dalam pemilihan suara pada hari dilaksanakan apakah juga dapat memenuhi target yang diinginkan. Apabila diingat partisipasi dalam pilkada dengan jalan menggunakan hak suaranya adalah yang dapat mempengaruhi calon pemimpin mana yang dapat menempati posisi sebagai pemimpin.

Kalau untuk jumlah angka pasti minta ke Pak David saja. sebab yang lebih tahu pak David, disana nanti ada semua, kok.<sup>3</sup>

Sebab saat wawancara dengan pak Mustofa masih belum didapat data yang valid tentang berapa jumlah partisipasi pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilihnya pada pilkada serentak 2018 di kabupaten Tulungagung kemarin, maka penulis berusaha menanyakan kepada pak David sebab diarahkan ke pak David:

Jika untuk jumlah partisipasi pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilihnya saya masih kurang tahu pasti. Kan datanya masih di bagian Program belum diberikan ke saya.<sup>3</sup>

Akhirnya demi mendapatkan data yang valid berapa jumlah yang sebenarnya pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilihnya, penulis datang ke bagian Perencanaan, Program dan Data.

Berapa ya mba, saya juga belum ngecek. Kayaknya tidak semua itu ikut berpartisipasi, coba tanya mas Bagus.<sup>3</sup>

Setelah dilakukan pengecekan oleh mas Bagus selaku staf di bagian Perencanaan, Program dan Data. Didapatkan jumlah sebagai berikut.

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Mustofa selaku anggota komisioner KPU Tulungagung, pada tanggal 8 Januari 2019.

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan bapak David selaku Kasubbag<sup>5</sup> Teknis dan Hupmas KPU Tulungagung , pada tanggal 8 Januari 2019

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Anam selaku Kasubbag<sup>6</sup> Perencanaan, Program dan Data KPU Tulungagung, pada tanggal 8 Januari 2019.

Pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilihnya 317 orang. Mengapa bisa rendah? Mungkin karena sosialisasi yang dilakukan hanya terpusat saja pada penyandang disabilitas yang tergabung dalam komunitas. Padahal kan banyak penyandang disabilitas yang tidak tergabung dalam komunitas.<sup>3</sup>

Angka 317 orang pengguna hak pilih penyandang disabilitas pada pilkada serentak 2018, sangatlah selisih jauh dengan jumlah keseluruhan pemilih penyandang disabilitas yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pilkada kemarin.

Tingkat partisipasi pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilihnya dalam pilkada serentak tahun 2018 kemarin tidak sepenuhnya tinggi. Dikarenakan masih banyaknya sarana yang disara belum memadai serta masih kurangnya perhatian petugas penyelenggara di Tempat Pemungutan Suara mengakibatkan rendahnya partisipasi pemilih penyandang disabilitas di Kabupaten Tulungagung. Berikut tabel jumlah pengguna hak pilih penyandang disabilitas yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tulungagung.

Tabel 4.2. Jumlah Pengguna Hak Pilih Penyandang Disabilitas Kabupaten Tulungagung

Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Tulungagung	Jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih		Jumlah total
	Jumlah pemilih laki-laki	Jumlah pemilih perempuan	
1. Bandung	8	5	13
2. Besuki	2	4	6
3. Boyolangu	10	6	16
4. Campurdarat	3	1	4
5. Gondang	18	15	33

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Mas Bagus selaku Staf Perencanaan, Program dan Data KPU Tulungagung, pada tanggal 8 Januari 2019.



6. Kalidawir	1	2	3
7. Karangrejo	1	0	1
8. Kauman	15	24	39
9. Kedungwaru	11	4	15
10. Ngantru	13	9	22
11. Ngunut	10	11	21
12. Pagerwojo	1	2	3
13. Pakel	12	11	23
14. Pucanglaban	13	7	20
15. Rejotangan	4	5	9
16. Sendang	6	6	12
17. Sumbergempol	10	11	21
18. Tanggunggunung	10	10	20
19. Tulungagung	16	20	36
Jumlah keseluruhan	164	153	317

Sumber: KPU Tulungagung model DB1-KWK Sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

Setelah penulis mengetahui secara keseluruhan berapa jumlah pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilihnya, dan melakukan perekapan data. Ternyata hanya didapat sekitar 317 orang yang menggunakan hak pilihnya. Dari sekitar 1235 orang yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pilkada 2018. Apabila di persentasekan jumlah tersebut hanya sekitar 25,6% dari jumlah keseluruhan pemilih penyandang disabilitas. Hal ini justru jauh dari apa yang di targetkan oleh KPU Tulungagung dalam perencanaan persiapan pilkada tahun 2018 kemarin. Sekitar 75% target yang ditetapkan KPU Tulungagung untuk partisipasi pemilih penyandang disabilitas pada pilkada 2018.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja, dan Aksi Kinerja<sup>8</sup> Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2017.

## **B. Temuan Penelitian**

### **1. Proses Pemutakhiran Data Pemilih Penyandang Disabilitas**

Setelah dilakukan proses pemutakhiran data pada tahapan pilkada tahun 2018. Diketahui jumlah pemilih penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Tulungagung sebanyak 1.235 orang, yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tulungagung. Dimana pada pelaksanaan pilkada sebelumnya yakni pada tahun 2013 tidak ada klasifikasi tentang pencantuman kolom penyandang disabilitas pada Daftar Pemilih Tetap (DPT). Regulasi tentang ketetapan pencantuman kolom penyandang disabilitas khususnya di Kabupaten Tulungagung baru dilaksanakan pada pilkada serentak tahun 2018.

Jumlah tersebut tersebar di 19 kecamatan di Kabupaten Tulungagung. Dengan persebaran tertinggi *pertama* terdapat di kecamatan Pucanglaban sejumlah 157 pemilih, *kedua* kecamatan Sumbergempol dengan jumlah pemilih 152, *ketiga* kecamatan Kauman 140 pemilih, *keempat* kecamatan Bandung 127 pemilih, *kelima* kecamatan Campurdarat 109 pemilih dan *keenam* kecamatan Ngunut 99 pemilih. Terdapat 5 klasifikasi yang terdapat dalam pengelompokan penyandang disabilitas pada pilkada serentak di Kabupaten Tulungagung diantaranya: (1) tuna daksa, (2) tuna netra, (3) tuna wicara/rungu, (4) tuna grahita, dan (5) disabilitas lainnya. Jumlah sebesar 1.235 orang pemilih penyandang disabilitas merupakan 33% bagian dari banyaknya jumlah penduduk penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Tulungagung. Dimana sebanyak 3.727 jiwa penduduk Kabupaten Tulungagung yang memiliki kebutuhan khusus.

Pemutakhiran data pemilih dengan mencantumkan kolom penyandang disabilitas ini menunjukkan bahwa pemerintah sudah tidak lagi mengesampingkan hak-hak para penyandang disabilitas, khususnya hak politik dalam memberikan suaranya untuk memilih seorang pemimpin. Ketetapan mengenai pencantuman kolom penyandang disabilitas ini adalah wujud perlindungan dan jaminan hak para penyandang disabilitas. seringkali para penyandang disabilitas mengalami diskriminasi dalam setiap keterlibatannya di masyarakat luas.

Dimunculkannya regulasi tentang mencantumkan keterangan pada kolom disabilitas untuk penyandang disabilitas. Juga bertujuan untuk memberitahu masyarakat luas bahwa meskipun penyandang disabilitas memiliki keterbatasan dalam setiap aktivitasnya, mereka masih memiliki hak yang sama salah satunya yakni hak dalam memberikan suara di pemilihan kepala daerah. Pencantuman kolom keterangan bagi penyandang disabilitas juga dapat memudahkan KPU Tulungagung dalam menyediakan sarana prasarana dalam menunjang aktivitas penyandang disabilitas terutama saat pemungutan suara. Salah satunya dengan disediakan alat bantu template *braille* untuk penyandang disabilitas tunanetra.

## **2. Tahapan Sosialisasi Pilkada Ramah Disabilitas**

Selain dilakukan pemutakhiran data oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), tahapan yang dilaksanakan oleh KPU Tulungagung untuk mewujudkan Pilkada yang ramah disabilitas adalah dengan dilakukan sosialisasi di beberapa daerah di Kabupaten Tulungagung. Pelaksanaan tahapan sosialisasi juga melibatkan pula komunitas penyandang cacat yang ada di Kabupaten

Tulungagung, seperti komunitas Percatu, Pertuni, serta masyarakat penyandang disabilitas lainnya.

Pada pelaksanaan sosialisasi terdapat beberapa materi yang disampaikan oleh KPU Tulungagung kepada para penyandang disabilitas yakni tentang pelaksanaan pemungutan suara, bagaimana cara mencoblos, pengenalan calon baik bupati dan wakil bupati serta gubernur dan wakil gubernur yang akan di pilih, memberitahukan kepada para pemilih penyandang disabilitas untuk menjadi pemilih yang cerdas yang memilih berdasarkan hati nurani tidak berdasarkan atas “janji/pemberian” yang sifatnya pragmatis seperti *money politic*. Dalam penyampaiannya kepada para penyandang disabilitas dilakukan berulang-ulang hal ini dikarenakan keterbatasan yang dimiliki oleh mereka, sehingga perlu dilakukan pengulangan agar materi yang diberikan dapat tersampaikan dengan baik.

Pada tahapan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Tulungagung hanya terpusat pada komunitas penyandang disabilitas yang ada di kabupaten Tulungagung. Padahal diketahui banyak penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Tulungagung tidak tergabung dalam komunitas tersebut. Sehingga banyak pemilih penyandang disabilitas tidak mengetahui bahwa terdapat sosialisasi yang dilakukan khusus untuk para pemilih disabilitas. Hal ini juga menimbulkan banyaknya masyarakat disabilitas yang tidak tahu bagaimana mereka dapat mengakses di TPS.

### **3. Sarana Prasarana Pemilih Penyandang Disabilitas**

Diketahuinya jumlah pemilih penyandang disabilitas pada pilkada tahun 2018 di Kabupaten Tulungagung. Menunjukkan banyaknya pemilih disabilitas yang ada, sehingga di perlukan sarana dan prasaran yang dapat membantu pemilih penyandang disabilitas dalam menjangkau Tempat Pemungutan Suara (TPS). Selain ketersediaan sarana prasarana yang sangat membantu pemilih penyandang disabilitas, peran penyelenggara dalam membantu para pemilih penyandang disabilitas juga sangat dibutuhkan.

Sarana dan prasarana yang disediakan oleh KPU Tulungagung dalam mensukseskan pilkada yang ramah disabilitas antar lain :

- a. Disediaknya template *braile* atau alat bantu coblos untuk pemilih tunanetra.
- b. Kesesuaian akses masuk ke TPS, dimana pintu masuk tidak boleh kurang dari 60cm, serta tidak menanjak naik.
- c. Di perbolehkannya ada pendamping khusus yang telah di tunjuk oleh si disabilitas untuk mendampingi dengan terdapat form untuk pendamping.
- d. Bimbingan terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk lebih memperhatikan pemilih penyandang disabilitas.

Ketersediaan TPS yang memiliki ruang yang luas juga dapat memberikan kemudahan kepada pengguna kursi roda untuk memasuki lokasi TPS. Ketentuan tentang penyediaan lokasi TPS yang ramah disabilitas ini juga diatur dalam pasal 19 ayat (2) PKPU nomor 9 tahun 2017 tentang perlengkapan pemilihan. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa TPS yang digunakan untuk pelaksanaan

pemungutan dan penghitungan suara harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas. Meskipun dari pihak KPU mengungkapkan telah memaksimalkan sarana dan prasarana untuk menjadikan pilkada yang ramah disabilitas, pada kenyataannya ketika hari pemungutan suara masih banyak TPS yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh peraturan yang ada.

Ketika pelaksanaan pemungutan suara ternyata yang terjadi di lapangan masih banyak TPS yang dalam penyediaannya kurang memadai untuk penyandang disabilitas. Sehingga sulit untuk penyandang disabilitas mengaksesnya. Selain kurang memadainya TPS sebagai saran pemungutan suara, di lapangan juga banyak petugas KPPS yang kurang perhatian terhadap keberadaan penyandang disabilitas yang datang ke TPS. Petugas KPPS juga tidak melakukan jemput bola terhadap penyandang disabilitas yang tidak bisa hadir di TPS. Kalaupun ada yang mau melakukan jemput bola dengan datang kerumah pemilih penyandang disabilitas itupun hanya satu atau dua KPPS.

#### **4. Tingkat partisipasi pemilih penyandang disabilitas**

Dalam hal ini terdapat beberapa alasan mengapa tingkat partisipasi pemilih penyandang disabilitas pada pilkada serentak tahun 2018 di Kabupaten Tulungagung cukup rendah.

- a. Kurang pahamiannya masyarakat terutama baik penyandang disabilitas dalam berpartisipasi pada pilkada serentak walaupun hanya sekedar menggunakan hak pilihnya.

- b. Masih banyak penyelenggara baik di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) maupun desa yang tidak mau mengupayakan hak para penyandang disabilitas.
- c. Terdapat beberapa TPS yang masih belum memenuhi syarat sebagai TPS yang ramah disabilitas.
- d. Menjadikan golput (golongan putih) sebagai jalur alternatif masyarakat penyandang disabilitas yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak dapat menjangkau TPS yang ada.
- e. Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU hanya terpusat pada komunitas penyandang disabilitas saja, padahal banyak penyandang disabilitas yang tidak tergabung dalam komunitas.